

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, jasa penunjang, dan pemeliharaan BMD mencapai tingkat realisasi fisik 100%. Seluruh sub-kegiatan operasional seperti penyediaan gaji ASN, sosialisasi peraturan perundang-undangan (7.000 orang), rapat koordinasi (12 laporan), hingga jasa pelayanan umum kantor terealisasi sepenuhnya sesuai target.
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Sub-kegiatan penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah berhasil mencapai target 100% dengan menghubungkan seluruh 46 Perangkat Daerah. Indikator kinerja infrastruktur TIK yang baik juga terpenuhi tepat 100%.
 - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor; Sub-kegiatan penyelenggaraan statistik yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI) memenuhi target penyusunan metadata sebanyak 5 dokumen (100%).
 - d. Program Penyelenggaraan Persandian; Seluruh sub-kegiatan pengamanan informasi mencatatkan realisasi 100%, baik pada penyusunan 12 laporan pelaksanaan keamanan informasi berbasis elektronik/non-elektronik maupun pemenuhan target penguatan 46 Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Publikasi melalui kanal media elektronik dan non-elektronik mencatatkan realisasi lonjakan kinerja yang signifikan hingga menembus angka 556% dari target awal sebesar 100%.
 - b. Realisasi tingkat keamanan informasi daerah melonjak melampaui estimasi perencanaan dengan mencatatkan angka 548 dari target awal yang dipatok sebesar 300.
 - c. Indikator keberhasilan statistik sektoral mencatatkan capaian angka 74 dari batas target evaluasi awal sebesar 40.
 - d. Penanganan Aduan & Standar Layanan IKP: Persentase aduan masyarakat yang ditangani tercapai melampaui target (realisasi 100% dari target 90%), dibarengi tingkat pemenuhan standar tata kelola

- Badan Publik yang naik hampir dua kali lipat menjadi 29% dari target awal 15%.
- e. Kinerja penetrasi rumah tangga dengan akses internet melampaui target dengan capaian 94% (target 91%), serta penyediaan layanan publik secara elektronik menyentuh 56% (target 55%).
 - f. Penyediaan data sektoral daerah berhasil dioptimalkan sepenuhnya mencapai tingkat realisasi 100% dari target awal sebesar 74%.
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- a. Kemitraan aktif Dinkominfo mencatatkan deviasi dengan realisasi akhir sebesar 85% dari target komitmen operasional sebesar 85,5%.
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Faktor pemicu melebihi target: Optimalisasi pemanfaatan kanal digital multi-platform memperluas jangkauan diseminasi. Selain itu, asistensi intensif tata kelola dokumen siber dan Satu Data mendorong kepatuhan OPD Badan Publik berkembang lebih cepat dari proyeksi awal.
 - b. Faktor pemenuhan tepat target: Alokasi anggaran operasional dan logistik kedinasan dikelola secara disiplin melalui sistem administrasi belanja rutin, berkontribusi langsung pada kestabilan realisasi fisik 100% di semua urusan.
 - c. Faktor belum terpenuhinya target kemitraan: Dinamika keaktifan kelompok binaan informasi di lapangan yang fluktuatif menyebabkan restrukturisasi kemitraan belum berjalan maksimal di penghujung tahun anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- a. Target layanan umum, jaringan, dan keamanan siber (diprediksi tercapai): Modal capaian baseline 100% dan lompatan indeks keamanan siber (548) pada tahun 2025 memberikan fondasi kokoh untuk menjamin seluruh target program selesai di akhir periode Renstra 2026.
 - b. Target integrasi data dan smart city memerlukan pengawalan lebih ketat. Walaupun nilai evaluasi SDI makro berjalan unggul (angka 74), penyiapan kualitas statistik sektoral dan perluasan jaringan kota cerdas menuntut konsistensi komitmen anggaran lintas sektoral agar target kumulatif Renstra tercapai di akhir tahun 2026.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Percepatan jadwal pelelangan dan administrasi kontrak: Mengubah linimasa pengadaan belanja modal non-rutin (seperti Smart City, infrastruktur siber, dan pengelolaan nama domain) agar proses tender atau penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah rampung pada Triwulan I, sehingga pelaksanaan fisik tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
 - b. Alokasi anggaran khusus penguatan kapasitas SDM siber: Menambahkan pos anggaran untuk pelatihan sertifikasi dan penguatan tim teknis persandian demi mendongkrak sisa target tingkat keamanan informasi sistem pemerintahan yang masih rendah.
 - c. Mengalihkan sebagian porsi anggaran media konvensional yang kurang efektif ke arah fasilitasi program bagi lembaga binaan atau mitra diseminasi informasi di tingkat bawah (seperti KIM/Kelompok Informasi Masyarakat) agar kemitraan kembali aktif.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **baik** yaitu dengan nilai **98,46%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun anggaran 2025, Sasaran 1 yang berfokus pada penguatan Layanan SPBE menunjukkan performa yang sangat positif. Melalui indikator **Indeks Layanan SPBE**, instansi menetapkan target sebesar 4,50. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang berhasil diraih adalah 4,39 atau tercapai 97,56%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rencana aksi transformasi digital, mulai dari integrasi aplikasi hingga penguatan infrastruktur pusat data, telah berjalan sesuai dengan baik.

2. Sasaran Strategis 2; Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun anggaran 2025, indikator **Indeks Layanan SPBE** diintegrasikan menjadi tolok ukur utama keberhasilan Dinkominfo. Dengan target sebesar 3,20, organisasi berhasil melampaui ekspektasi dengan mencapai nilai realisasi 3,50. Keberhasilan ini menghasilkan capaian kinerja tahunan

sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa fondasi Tata Kelola seperti kebijakan internal, peta rencana SPBE, dan koordinasi tim telah terbentuk dengan solid.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Pada tahun 2024 indikator **Nilai Keterbukaan Informasi Publik** mencatatkan kinerja maksimal dengan capaian kinerja 100%. Memasuki tahun 2025 standar target ditingkatkan menjadi 96,00 sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas layanan informasi. Berdasarkan hasil evaluasi KIP Provinsi Jawa Tengah, diperoleh nilai realisasi sebesar 91,34 atau mencapai 95,15% dari target tahunan. Meskipun terdapat selisih sebesar 4,85%, nilai ini tetap menempatkan Pemerintah Daerah pada kualifikasi yang sangat baik. Selisih tersebut disebabkan karena adanya standarisasi penilaian yang semakin ketat dari KIP Provinsi, terutama pada aspek penguatan fungsi PPID.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, Sasaran 4 menunjukkan efektivitas kinerja yang sangat optimal dengan rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% pada tahun 2025. Keberhasilan ini diukur oleh 2 (dua) indikator yaitu:

- a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);** Mencatatkan realisasi sebesar 88,59, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 79,90.
- b. **Nilai AKIP Perangkat Daerah;** Berhasil mencapai realisasi sebesar 74,20, tepat sesuai dengan target tahunan yang dipatok 100%. Ini merefleksikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 dan 2.3 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
Indikator Kinerja Utama (IKU)									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,70	3,75	3,80	3,80	3,80	100	Sangat Tinggi
2	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,50	4,60	4,70	4,39	4,39	95,43	Sangat Tinggi
3	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,20	3,30	3,40	3,30	3,50	100	Sangat Tinggi
4	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	96,00	96,50	97,00	91,34	91,34	94,65	Sangat Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	79,90	82,30	83,30	88,59	88,59	100	Sangat Tinggi
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,20	75,25	75,50	74,20	74,20	98,60	Sangat Tinggi
Indikator Program									
1	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85,50	85,75	86,00	85,29	85,29	99,47	Sangat Tinggi
3	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	100	100	556,30	70,20	70,20	Sedang
4	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
5	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	15	17,5	20	28,74	28,74	100	Sangat Tinggi
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo melalui jaringan fiber optik	%	65,00	70,00	75,00	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	75,00	85,00	90,00	75,57	75,57	88,91	Tinggi
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	80,50	80,75	81,00	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Persentase layanan publik secara elektronik	%	55	75	85	55,73	55,73	55,73	Sedang
10	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	100	37,68	66,67	100	100	100	Sangat Tinggi
11	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	91,00	91,50	92,00	94,24	94,24	100	Sangat Tinggi
12	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
13	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
14	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	Angka	40	50	55	74,40	74,40	100	Sangat Tinggi
15	Ketersediaan data statistik sektoral	%	74	100	100	100	30,20	30,20	Sangat Rendah
16	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	74	300	3,20	548	548	100	Sangat Tinggi
17	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	100	100	100	17,65	17,65	Sangat Rendah

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
INDIKATOR IKK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo melalui jaringan fiber optik	Persen	65,00	70,00	75,00	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75,00	85,00	90,00	75,57	75,57	88,91	Tinggi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	80,50	80,75	81,00	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	46,00	48,00	50,00	63,41	63,41	100	Sangat Tinggi

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2026

Penjelasan untuk masing masing indikator diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara umum, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat progresif. Berdasarkan target tahunan yang ditetapkan, mayoritas indikator makro berhasil mencatatkan nilai capaian dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini mencerminkan keberhasilan pondasi transformasi digital yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan realisasi nilai sebesar 3,80. Angka ini telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2026, yaitu sebesar 3,75, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja, capaian ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST).

a. Faktor pendorong

- 1) Sinergi dan kerja sama antar-perangkat daerah dalam mengintegrasikan data serta layanan digital semakin kuat dan meningkat.
- 2) Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah yang sangat optimal, mencakup penguatan regulasi/kebijakan, kelembagaan yang jelas, hingga dukungan penganggaran.
- 3) Adanya kepemimpinan yang fokus pada penguatan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan evaluasi program secara berkala.

b. Faktor penghambat

- 1) Kualitas data dan dokumen metadata antar-instansi belum seragam, sehingga menghambat standardisasi sistem.
- 2) Perbedaan standar data tersebut menimbulkan kendala dan ego sektoral saat proses penyatuan layanan digital.

- 3) Adanya faktor geografis wilayah yang menghambat infrastruktur internet serta dinamisnya perubahan regulasi dari pemerintah pusat.
- c. Rekomendasi tindak lanjut
- 1) Memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Daerah guna memastikan seluruh basis data akurat, mutakhir, dan saling terhubung.
 - 2) Melakukan harmonisasi aturan lokal agar lebih adaptif dan cepat merespons perubahan regulasi atau parameter penilaian dari pusat.
 - 3) Mengoptimalkan forum koordinasi dan pembinaan teknis antar-OPD untuk menyamakan persepsi serta mempercepat waktu tanggap layanan publik.

2. Indeks Layanan SPBE

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indeks Layanan SPBE mencatatkan performa yang sangat progresif dengan realisasi mencapai 4,39 dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 3,75 (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- 1) Keberhasilan mengintegrasikan puluhan aplikasi layanan publik sektoral ke dalam satu Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terpadu.
- 2) Tingginya tingkat adopsi digital oleh masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) akibat sosialisasi masif sejak tahun 2025.
- 3) Kesiapan teknis tim pengembang Dinkominfo dalam mengintegrasikan *Application Programming Interface* (API) lintas sektor tanpa *lag*.

b. Faktor penghambat

- 1) Munculnya risiko kerentanan keamanan informasi (*cyber attack* seperti *malware* dan *ransomware*) seiring melonjaknya volume transaksi harian pada portal utama.
- 2) Belum semua layanan publik terdigitalisasi penuh, masih ada tahapan manual atau semi-digital.
- 3) Minimnya SDM tenaga programmer.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Melaksanakan *Vulnerability Assessment and Penetration Testing* (VAPT) secara berkala minimal dua bulan sekali terhadap portal utama.
- 2) Evaluasi berkala Indeks Layanan SPBE sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan mutu layanan berbasis elektronik.
- 3) Penetapan skala prioritas terhadap pengembangan aplikasi layanan digital.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis khusus bagi operator layanan di tingkat terkecil untuk menjamin konsistensi input data.

3. Indeks Tata Kelola SPBE

Realisasi Indeks Tata Kelola SPBE pada Triwulan I Tahun 2026 berhasil menyentuh angka 3,50, melebihi target tahunan yang dipatok sebesar 3,30 (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan rekomendasi yang harus ditundaklanjuti adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- 1) Peningkatan pemahaman aparatur terhadap pentingnya pengelolaan data, layanan, dan keamanan informasi secara terstruktur.
- 2) Aktifnya fungsi Tim Koordinasi SPBE Daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah secara otoritatif untuk memecah kebuntuan ego sektoral.

b. Faktor penghambat

- 1) Belum meratanya tingkat kompetensi aparatur dalam pengelolaan data, layanan digital, dan keamanan informasi.
- 2) Adanya resistensi birokrasi kontemporer (pola pikir manual) pada beberapa pejabat struktural senior yang menghambat implementasi tata kelola berbasis digital murni.

- c. Rekomendasi tindak lanjut
 - 1) Melakukan revidi, sinkronisasi, dan pemutakhiran berkala terhadap Dokumen Proses Bisnis Daerah agar selaras dengan regulasi pusat terbaru.
 - 2) Memperkuat peraturan dan kebijakan internal SPBE, dengan pembaruan peta rencana.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan I Tahun 2026 terealisasi sebesar 91,34 dari target tahunan sebesar 96,50 (Tingkat Capaian 94,65% dengan predikat Sangat Tinggi). Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- 1) Keaktifan PPID Pelaksana Badan Publik yang secara rutin menyediakan dokumen-dokumen yang masuk dalam kategori Daftar Informasi Publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Digitalisasi proses pengunggahan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIED) secara otomatis.

b. Faktor penghambat

- 1) Masih terdapat beberapa Pejabat Publik yang awam dengan Keterbukaan Informasi Publik, seperti LHKPN yang harusnya terbuka untuk umum (DIP) dan masih banyak PPID Pelaksana Desa yang belum memahami Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Potensi munculnya risiko sengketa informasi apabila dokumen internal yang dianggap rahasia oleh OPD teknis belum diklasifikasikan secara hukum namun dinilai terbuka oleh publik.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pendampingan yang masif bagi PPID Pelaksana OPD, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
- 2) Menyelenggarakan simulasi penanganan sengketa informasi publik bersama Komisi Informasi Provinsi untuk meningkatkan kapasitas mitigasi hukum para petugas PPID.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan realisasi sebesar 88,59 dari target tahunan sebesar 82,30 (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Faktor pendorong, penghambat dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

a. Faktor pendorong

Adanya kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian layanan (*Service Level Agreement* - SLA) yang terpampang transparan pada sistem aplikasi pengguna.

b. Faktor penghambat

- 1) Tingginya ketergantungan operasional terhadap stabilitas infrastruktur fisik, di mana gangguan pemadaman listrik Data Center atau interupsi jaringan internet (ISP) dapat langsung memicu komplain massal.
- 2) Belum optimalnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme aduan

c. Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Mengimplementasikan sistem pengisian survei kepuasan instan (*pop-up rating*) otomatis di akhir setiap sesi transaksi aplikasi guna memperoleh data kepuasan harian secara objektif.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme aduan secara rutin dan berkala.

6. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2026 berada pada angka 74,20 dari target kinerja tahunan sebesar 75,25 (Tingkat Capaian 98,60% dengan predikat Sangat Tinggi).

a. Faktor pendorong

- 1) Dukungan dari pimpinan dalam mengawal akuntabilitas kinerja.
- 2) Kapasitas SDM yang cukup mumpuni.
- 3) Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi.

- b. Faktor penghambat
 - 1) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam memastikan kualitas laporan kinerja.
 - 2) Proses distribusi target kinerja tahunan dari atasan ke pelaksana di bawahnya (*pohon kinerja*) yang sebagian besar masih belum sepenuhnya mencerminkan beban kerja harian riil staf pelaksana.
- c. Rekomendasi tindak lanjut

Difokuskan pada pelaksanaan asistensi tatap muka terfokus mengenai metode pengukuran kinerja berbasis luaran bagi seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK) serta melakukan perbaikan draf laporan kinerja berkala dengan menyertakan infografis visual realisasi fisik-anggaran demi memudahkan evaluasi internal pada triwulan berikutnya.

B. Indikator Kinerja Program

- 1. Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah telah berjalan sangat optimal. Dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100%, maka akumulasi capaian kinerja hingga Triwulan I Tahun 2026 berhasil menyentuh angka 100% (tercapai sepenuhnya).
 - a. Faktor pendorong
 - Konsistensi capaian 100% didukung oleh penyusunan rencana kerja (Renja) dan rincian anggaran yang presisi sejak awal tahun anggaran.
 - Adanya pemahaman yang kuat dari pejabat pengelola keuangan terhadap regulasi penatausahaan dan tata kelola administrasi perkantoran.
 - Proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana untuk jasa penunjang (seperti telepon, dan ATK) berjalan tepat waktu tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
 - b. Faktor penghambat
 - Adanya risiko fluktuasi harga barang dan jasa penunjang di pasar yang sewaktu-waktu dapat mengganggu stabilitas pagu anggaran yang telah ditetapkan.
 - Perubahan minor atau penyesuaian aplikasi sistem informasi keuangan dari pemerintah pusat yang

terkadang memerlukan masa adaptasi cepat bagi operator daerah.

- Volume dokumen pertanggungjawaban yang tinggi di awal tahun anggaran (Triwulan I) menuntut fokus penuh dari personel yang terbatas agar tidak terjadi keterlambatan input data.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kearsipan dan keuangan digital secara penuh untuk memangkas waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- Menjadwalkan pelatihan berkelanjutan atau *coaching clinic* bagi bendahara dan pembantu bendahara untuk meminimalisir kesalahan administratif dalam pelaporan keuangan.

2. Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang Aktif

Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi yang aktif pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan angka 85,29% dari target tahunan 85,75% (Tingkat Capaian 99,47% dengan predikat Sangat Tinggi). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- Keterjangkauan diseminasi informasi yang luas
- Tingkat pemahaman lembaga mitra atau binaan seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Penyiaran terhadap pedoman program dan norma siaran yang sangat baik.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang intensif serta rutin dari Dinkominfo Kabupaten Temanggung kepada lembaga binaan.
- Adanya pembinaan sumber daya manusia (SDM) komunikasi yang diberikan kepada pengurus lembaga untuk meningkatkan kemampuan diseminasi dan keterbukaan informasi.

b. Faktor penghambat

- Tingkat keaktifan dan partisipasi pengurus lembaga binaan naik-turun karena mayoritas bersifat sukarela.
- Kompetensi pengelola di tingkat lapangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan diseminasi konten belum merata.
- Terbatasnya fasilitas pendukung teknologi informasi yang dimiliki oleh lembaga mitra untuk menyebarluaskan berita.
- Sering terjadi pergantian personel pada lembaga binaan yang menyebabkan proses pembinaan harus diulang dari awal.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan pembuatan konten kreatif secara rutin untuk mengatasi kesenjangan kompetensi SDM mitra.
- Membuat panduan baku (SOP) pelaksanaan tugas serta sistem penghargaan (*reward*) untuk menjaga stabilitas komitmen pengurus kelompok.
- Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah desa, akademisi, atau pihak swasta untuk membantu penyediaan sarana prasarana TI di lapangan.

3. Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non-Elektronik

Indikator Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi baru mencapai realisasi sebesar 70,20% dari target mutlak tahunan sebesar 100% (Tingkat Capaian 70,20% dengan predikat Sedang). Di satu sisi, produksi konten mandiri secara elektronik (video pendek dan grafis media sosial) oleh tim kreatif internal Dinkominfo berjalan sangat aktif sejak awal tahun tanpa memakan biaya besar. Capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- Kemampuan *Soft-skill* dan *Hard-skill* SDM yang bertindak sebagai jurnalis dalam melakukan produksi konten, rilis berita, maupun ILM yang memberikan informasi tentang

program kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Pemanfaatan berbagai jenis media komunikasi resmi milik pemerintah daerah secara simultan. Ini mencakup media elektronik/baru (website, media center, media sosial) serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung FM).
- Efektivitas penyebaran informasi luar ruang melalui baliho, videotron, media tradisional (pertunjukan rakyat melalui FK Mitra), hingga komunikasi tatap muka interpersonal (sarasehan, ceramah, lokakarya).

b. Faktor penghambat

- Keaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa dalam mendiseminasikan ulang informasi atau memberikan umpan balik masih belum merata.
- Masih terdapat perbedaan kapasitas teknis antar staf dalam penguasaan tren media sosial terkini dan pembuatan konten multimedia yang cepat serta menarik.
- Kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan diseminasi informasi.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Mengaktifkan kembali KIM di tingkat desa melalui pelatihan pembuatan konten lokal agar mampu menjadi perpanjangan tangan diseminasi informasi pemerintah.
- Menyelenggarakan bimbingan teknis berkala bagi staf pengelola media mengenai tren komunikasi publik, infografis, dan videografis terkini.
- Mengatur ulang titik strategis pemasangan media non-elektronik (baliho/spanduk) guna menjangkau masyarakat di wilayah yang minim sinyal internet.

4. Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan Dinkominfo

Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat berhasil mencatatkan rapor sempurna dengan realisasi 100% dari target tahunan 100% (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Keberhasilan ini ditopang penuh oleh penerapan sistem notifikasi instan berbasis bot pengingat yang

langsung meneruskan aduan masuk ke ponsel para pejabat teknis/admin perangkat daerah. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- Kemudahan dalam mengakses kanal aduan bagi masyarakat dan SDM Layanan Aduan yang mumpuni dalam merespon laporan aduan.
- Adanya standar operasional prosedur yang mengatur batas waktu maksimum (SLA) pengiriman aduan ke OPD terkait hingga proses penyelesaian.
- Terbentuknya jaringan komunikasi dan koordinasi yang solid antara Admin Utama Dinkominfo dengan Admin Pembantu di setiap OPD dan Kecamatan.
- Dukungan kuat dari pimpinan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap setiap keluhan masyarakat.

b. Faktor penghambat

- Respond time pihak teknis terkait yang menangani aduan yang masih perlu dipercepat
- Banyaknya laporan masuk yang tidak sesuai substansi wewenang pemerintah daerah, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyaring data.
- Adanya pergantian personel admin pembantu di tingkat kecamatan atau puskesmas yang mengganggu kelancaran koordinasi penanganan.
- Belum adanya sistem verifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan jenis aduan secara cepat ke instansi yang tepat.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Melakukan koordinasi dan sinergi dengan OPD teknis yang menangani aduan agar segera ada balasan dan juga tindak lanjut kepada Masyarakat.
- Mengembangkan sistem kecerdasan buatan (*AI screening*) atau *drop-down menu* kategori pada aplikasi aduan untuk meminimalkan laporan salah alamat.

- Memberikan penghargaan tahunan kepada OPD atau Kecamatan dengan waktu respons tercepat dan tingkat penyelesaian aduan tertinggi.
5. Persentase Badan Publik yang Memenuhi Standar Tata Kelola dan Layanan Informasi Komunikasi Publik

Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola melesat jauh dengan realisasi sebesar 28,74% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 17,5% (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Hasil yang melampaui target ini merupakan dampak kumulatif dari program asistensi tatap muka beruntun dan bimbingan teknis intensif yang dilakukan secara masif pada kuartal akhir tahun sebelumnya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja ini antara lain sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- Adanya kesadaran dan dukungan penuh dari kepala instansi/badan publik selaku atasan PPID untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkungannya
- Rutin melakukan monitoring dan evaluasi kepada PPID Pelaksana OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, dan pembinaan rutin bagi para petugas admin PPID Pembantu mengenai tata cara pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
- Penyediaan portal PPID utama yang terintegrasi secara digital, mempermudah badan publik mengunggah Dokumen Informasi Publik (DIP) dan memproses permohonan informasi masyarakat.

b. Faktor penghambat

- Masih terdapat beberapa Pejabat Publik yang awam dengan Keterbukaan Informasi Publik, seperti LHKPN yang harusnya terbuka untuk umum (DIP) dan masih banyak PPID Pelaksana Desa yang belum memahami Keterbukaan Informasi Publik.
- Petugas pengelola PPID Pembantu di lapangan sering kali belum memahami secara mendalam regulasi sengketa

informasi dan tata cara pengujian konsekuensi dokumen rahasia.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pendampingan yang masif bagi PPID Pelaksana OPD, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
- mewajibkan setiap Badan Publik menyusun dokumen manual operasional tertulis yang baku terkait pengelolaan informasi, serta menyediakan platform pembelajaran daring mandiri (LMS) yang dapat diakses oleh pegawai baru kapan saja.

6. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo melalui jaringan fiber optik

Realisasi kinerja indikator ini pada Triwulan I 2026 berhasil mencapai 100%, melampaui target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 70,00%. Kinerja ini mendapatkan predikat Sangat Tinggi karena seluruh OPD utama telah berhasil terintegrasi secara fisik melalui jaringan kabel serat optik daerah.

a. Faktor pendorong

- Konsistensi pemeliharaan infrastruktur secara berkala oleh tim teknis Dinkominfo,
- Perluasan jalur FO yang berkolaborasi dengan penyedia jaringan logikal daerah

a. Faktor penghambat

- Kerentanan fisik kabel FO luar ruang terhadap gangguan eksternal seperti bencana alam (pohon tumbang/tanah longsor di area berbukit) atau aktivitas

a. Rekomendasi tindak lanjut

- Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur jaringan cadangan nirkabel atau rute FO alternatif guna menjaga konektivitas agar tidak putus total jika jalur utama mengalami gangguan fisik.

7. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Realisasi capaian kinerja hingga Triwulan I 2026 tercatat sebesar 88,91%, sedikit di atas target tahunan 2026 yang sebesar 85,00%. Kinerja berada pada skala nilai Tinggi. Meskipun melampaui target tahun ini, integrasi penuh menuju target 2027 (90,00%) memerlukan pengawasan ketat agar kestabilan sistem terjaga.

a. Faktor pendorong

- Adanya mandat regulasi dan peta rencana (*roadmap*) Arsitektur SPBE Kabupaten Temanggung yang mendorong OPD teknis mengalihkan pelayanan manual menjadi digital ke dalam basis data terpadu.

b. Faktor penghambat

- Masih adanya ego sektoral di mana beberapa OPD membangun aplikasi pelayanan mandiri yang belum terintegrasi penuh atau belum saling berbagi pakai data.

a. Rekomendasi tindak lanjut

- Melakukan konsolidasi dan standardisasi aplikasi ke dalam satu portal layanan terpadu (*Super Apps*) Temanggung.

8. Persentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas

Indikator ini mencatatkan realisasi sebesar 100% pada Triwulan I 2026, berada di atas target kinerja 2026 yang dipatok pada angka 80,75%. Capaian ini dikategorikan ke dalam peringkat Sangat Tinggi, mencerminkan efektivitas jangkauan diseminasi informasi publik di wilayah Temanggung.

a. Faktor pendorong

- Pemanfaatan strategi *multichannel* yang masif, memadukan media elektronik baru (website, media sosial resmi, LPPL Temanggung TV/FM) dengan kanal non-elektronik (media luar ruang dan pertunjukan rakyat komunikasi tatap muka).
- Kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan penggerak lokal dalam meneruskan